BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt berfirman dalam Q.S adz-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Allah swt juga berfirman dalam Q.S Yasin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

Berpasang-pasangan adalah pola hidup yang ditetapkan Allah bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan yaitu dengan melaksanakan pernikahan.³ Manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan dengan disyariatkannya suatu pernikahan.

Pengertian nikah yang berasal dari kata (نكح- ينكح- النكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti

¹Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2001), hlm. 522.

²*Ibid.*, hlm. 442.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 196-197.

bersetubuh (الوطء).⁴ Senada juga yang diungkapkan dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 9 karya Wahbah Az-Zuhaili yang berbunyi:

تعريف الزواج: النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعاً، وهو في الشرع: عقد التزويج، والزواج شرعاً، عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الاستمتاع بالمرأة.⁵

Menurut para ahli fikih empat mazhab kata “nikah” dalam bahasa arab merupakan kata yang digunakan secara hakikat (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, secara majaz (kiasan) mengungkapkan makna hubungan intim.⁶

Pengertian pernikahan juga dijelaskan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fath al-Wahbah* karya Abu Yahya Zakariya Al-Anshary yang berbunyi:

النِّكَاحُ شُرْعاً هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.⁷

Pernikahan yang dipandang dari segi hukum adalah suatu perjanjian yang kuat, disebut dengan “*mīṣāqan galīẓan*”.⁸ Sebagaimana, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisaa’/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 43.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz. 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 6513.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8. Sebagaimana dikutip dalam *Kitab Fath al-Wahbah* karya Abu Yahya Zakariya Al-Anshary.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 25.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istri mu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁹

Ungkapan redaksi “*mīsāqan galīzan*” dalam Q.S. an-Nisaa’/4: 21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat dan sama nilainya dengan perjanjian.¹⁰

Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa pernikahan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.¹¹

Hal ini dipertegas dalam Q.S. ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹²

Berdasarkan Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīsāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 81.

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 21.

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 185.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika didahulukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu ikatan perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan agama. Sahnya perkawinan menurut agama Islam adalah harus

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

¹⁴Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 107.

¹⁵Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, cet. III (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 2.

terpenuhinya syarat dan rukun nikah sedangkan, Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁶

Mengenai pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Untuk memenuhi kekuatan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹⁷

Pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) berupa akta nikah yang diperlukan sebagai bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi adanya suatu perkawinan yang sah secara hukum negara.¹⁸

Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-bersembunyi tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

¹⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 13.

¹⁷Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, cet. I (Bandung: Citra Umbara, t.th.), hlm. 325.

¹⁸Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 53.

Perkawinan ini disebut sebagai perkawinan di bawah tangan, yang tentu saja tidak mendapatkan akta autentik berupa akta nikah karena perkawinannya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Tanpa adanya akta nikah maka suami istri tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) dimata hukum negara dan dianggap tidak sah (*never existed*).¹⁹

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat menjadi kepastian hukum apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan Agama.²⁰

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada mereka yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sesuai dengan

¹⁹Nindiasanda Frengky Putri, "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010," Jurnal Fakultas Hukum (2015): hlm. 12.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 99.

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.²¹ Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syaratnya perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²²

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah, Pengadilan Agama harus berhati-hati dan teliti dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara agar menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Mahkamah Agung menetapkan beberapa ketentuan permohonan isbat nikah harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh kedua suami istri atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan isbat nikah yang diajukan suami istri secara bersama-sama adalah perkara *voluntair* yang produknya berupa penetapan.
- c. Permohonan isbat nikahnya diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *contentious* (gugatan), pihak yang mengajukan berkedudukan sebagai pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai termohon. Produknya berupa putusan, upaya hukumnya banding dan kasasi.

²¹Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 100.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, “Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: Departemen Agama,t.th), hlm. 15-16.

- d. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam huruf (a) dan (b) tersebut diatas, apabila diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang lain, maka istri lain itu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak bersedia memasukkannya sebagai pihak, maka permohonan isbat nikah *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*).
- e. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah atau pihak lain harus dalam bentuk *contentious* dengan mendudukan suami atau istri dan ahli waris lain sebagai termohon.
- f. Amar penetapan isbat nikah yang dikabulkan berbunyi: “Menetapkan sahnya perkawinan si ... dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...”²³

Pemaparan diatas dapat menjelaskan hal yang melatarbelakangi perkara perdata Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg berkaitan dengan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat. Pihak istri mengajukan permohonan isbat nikah sebagai langkah menuju perceraian di Pengadilan Agama Tanjung. Perkara ini dikaji dalam hukum acara perdata terdapat unsur penggabungan dua objek perkara menjadi satu.

Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada umumnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan

²³M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 44.

gugatan dalam satu surat gugatan diperkenankan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas dan masih dalam batas-batas tertentu.²⁴ Mengenai perkara Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, penggabungan antara isbat nikah dan cerai gugat termasuk dalam kumulasi objektif .

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat akan melalui dua tahap persidangan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan isbat nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnya suatu perkawinan dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap persidangan yang kedua yaitu perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup dan putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, sebelum menjatuhkan putusan perceraian terlebih dahulu menetapkan sahnya perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian diperlukan adanya bukti telah terjadi suatu perkawinan yang sah.²⁵

Permasalahan yang penulis temukan dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg adalah saat mengajukan permohonan isbat nikah dalam

²⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 55.

²⁵Muhammad Ibrahim Jarullah, “*Studi Analisis Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara Nomor. 263/Pdt/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hlm. 6.

rangka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung, dalam duduk perkaranya diketahui bahwasanya suaminya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Mengenai pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah jika diketahui suaminya masih terikat dengan perempuan lain, maka istri lain itu harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila pemohon tidak bersedia memasukkannya sebagai pihak, maka permohonan isbat nikah *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*). Surat permohonan isbat nikahnya diketahui Penggugat tidak menjadikan istri lain tersebut sebagai pihak dalam perkara. Masalah yang muncul adalah sudah semestinya permohonan isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi hakim Pengadilan Agama Tanjung mengabulkan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian tersebut.

Perkara Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. Tergugat merasa keberatan terhadap putusan verstek tersebut, kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. Mengenai putusan verzet Majelis Hakim menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal terhadap putusan verstek tidak tepat dan tidak beralasan karena dalil bantahan Pelawan/Tergugat Asal tidak terbukti dan Majelis Hakim tetap mempertahankan putusan verstek.

Terhadap putusan verzet tersebut Pelawan/Tergugat Asal mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perkara Nomor

11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, di tingkat banding hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung mengenai alat bukti dalam menyatakan sahnya suatu perkawinan. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada amar putusannya membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan mengadili sendiri, menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan putusan verstek Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 adalah tepat dan beralasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan melihat pada beberapa masalah yang telah ditemukan penulis terhadap putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan di teliti. Maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.
2. Mengetahui analisis hukum terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi

masukannya bagi para hakim agar lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap beberapa istilah dan menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.²⁶ Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap beberapa masalah yang terdapat pada putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.
2. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.²⁷ Putusan yang dimaksud adalah produk hukum

²⁶Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 58.

²⁷Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 203.

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

3. Kumulasi disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vondering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.²⁸ Penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan antara isbat nikah dengan cerai gugat.
4. Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat mana yang bersangkutan tinggal tentang suatu perkawinan telah terjadi.²⁹ Isbat nikah yang dimaksud adalah pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh pihak istri yang bersifat *contentious* dalam rangka perceraian yaitu pihak istri mengajukan penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang kumulasi gugatan. Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai kumulasi gugatan, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan

²⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 102.

²⁹Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 50.

pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang kumulasi gugatan diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara Nomor. 263/Pdt.G/2013/PA. Mlg di Pengadilan Agama Malang” yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Jarullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada kekuatan dan kelemahan putusan hakim terhadap perkara isbat nikah dan perceraian Nomor 263/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan tinjauan putusan hakim dalam perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan deskriptif analitis, pengumpulan datanya dengan sistem dokumentasi dan dikaji secara komprehensif. Hasil penelitiannya adalah dasar kekuatan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan isbat nikah yaitu: legal standing (kedudukan hukum) penggugat mengajukan isbat nikah dan gugatan cerai, posita (fakta kejadian dan fakta hukum), keterangan saksi dan bukti di persidangan, alasan mengajukan isbat nikah. Kelemahan putusan pengadilan tersebut terkesan kaku, tidak mencantumkan dalil hukum Islam dan pandangan ulama. Dampak dari putusan hakim dalam perspektif masalah yakni dalam putusannya menolak isbat nikah, karena nikahnya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni tidak ada wali yang sah.³⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Kumulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor

³⁰Muhammad Ibrahim Jarullah, “*Studi Analisis Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara Nomor. 263/Pdt/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

38/Pdt.G/2009/PA.Jr)” yang ditulis oleh Agnes Mahesa Putra mahasiswi Universitas Jember. Penelitian ini membahas tentang perkara putusan Nomor 38/Pdt.G/2001/PA.Jr komulasi dalam pemeriksaan isbat nikah dan cerai gugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat keterangan Kantor Urusan Agama tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara Nomor 38/Pdt.G/2001/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah *pertama*, Penggugat dapat mengajukan gugatan komulasi yaitu permohonan isbat nikah dan gugatan cerai karena pengajuan isbat nikah itu tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian karena itu, dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan. *Kedua*, surat keterangan Kantor Urusan Agama belum dicatatkannya perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti. *Ketiga*, Majelis Hakim menyatakan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.³¹

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA.MKS)” yang ditulis oleh Arsyiarti Arja mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dan bagaimana Penggugat mengajukan kumulasi gugatan dalam perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA.MKS.

³¹Agnes Mahesa Putra, “Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat Di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomormor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan metode kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar dan melakukan wawancara dengan hakim serta memperoleh sumber data dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar adalah bervariasi yakni, penggabungan gugat cerai dengan asal usul anak, penggabungan gugat cerai dan pembagian harta bersama, penggabungan penetapan isbat nikah dengan gugat cerai. Pasal yang berkaitan dengan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Penggugat mengajukan kumulasi gugatan dalam perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks yakni kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai sekaligus. Kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian di waktu yang bersamaan.³²

Keempat, tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang” yang ditulis oleh Puji Restu Anugrah Ananda mahasiswi Universitas Andalas. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan suatu perkawinan yang tujuannya dalam menyelesaikan suatu perceraian dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya adalah perkara kumulasi isbat nikah dengan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama disebut

³²Arsyatri Arja, “Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor. 1345/Pdt.G/2012/PA.MKS)”, Skripsi (Makassar: Unhas, 2014).

dengan perkara “kumulasi” merupakan perkara *contentious* yang produk hukumnya berupa putusan dan dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, jika para pihak tidak menerima putusan tersebut dan kendala yang ditemukan dalam perkara ini adalah terdapat faktor kesalahan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang lalai atau sengaja dalam melakukan pencatatan dan pelaporan nikah ke KUA.³³

Kelima, skripsi yang berjudul “Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)” yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Darwis mahasiswa IAIN Antasari. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai, faktor yang menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya dan dampak yang dirasakan oleh para pihak pada kasus kumulasi. Perolehan datanya dengan cara observasi dan wawancara kepada para responden dan informan. Hasil penelitiannya adalah praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai terdapat dua variasi gugatan: Cerai gugat dikumulasikan dengan nafkah anak dan Cerai gugat dikumulasikan dengan hak asuh anak atau hadhanah. Faktor yang menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama. Dampak positif yang dirasakan oleh para pihak: dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus dan pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan bersamaan. Dampak negatifnya: alasan-alasan mengenai kehidupan rumah tangga sehingga terjadi perceraian sulit

³³Puji Restu Anugrah Ananda, “Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang”, Tesis (Padang: Unand, 2014).

diungkapkan penggugat karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan dan sulit untuk melakukan banding.³⁴

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai kumulasi gugatan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan menitikberatkan pada hukum materiil dan hukum formil dalam memeriksa perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, alat bukti dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menganalisis putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA. Bjm.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud penulis disini adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah

³⁴Muhammad Fauzi Darwis, “*Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)*”, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2008).

dari peraturan perundangan yang terakait dengan putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam masalah yang dihadapi.³⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dimaksud penulis teliti disini adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan yang dianalisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materiil yang berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi fokus pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.³⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cet. XIII (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁷ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II karya Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama.
- 6) Salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 341/Pdt.G/2017/Pa.Tjg dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata tentang kumulasi gugatan dan alat bukti. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

³⁷*Ibid.*, hlm. 181.

1) Buku hukum

- a) *Hukum Acara Perdata* karya Yahya Harahap.
- b) *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* karya Sarmin Syukur.
- c) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan.
- d) *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Roihan A. Rasyid.
- e) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* karya Mukti Arto.
- f) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* karya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.
- g) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia* karya M.Fauzan.

2) Kitab fikih

- a) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.
- b) *Fiqhu Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- c) *Al-Umm* karya Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris.

3) Skripsi

- a) *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)* karya Nur Hidayah, Universitas Negeri Makassar.

b) *Studi Analisis Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Perkara Nomor 263/Pdt.G/2013/PA. Mlg di Pengadilan Agama Malang*, karya Muhammad Ibrahim Jarullah, UIN Maulana Malik Ibrahim.

c) *Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA. Tgt)* karya Rusli, UIN Antasari Banjarmasin.

4) Jurnal hukum

a) *Isbat Nikah dalam Perkawinan di Indonesia* karya Ahmad Ainani.

b) *Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Nomor 46/PUU/VIII/2010* karya Nindiasanda Frengky Putri.

c) Bahan non hukum atau tersier berupa *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dan *Kamus Hukum*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan Daerah Banjarmasin
- 2) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 3) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 4) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 5) Media internet

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab fikih, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori ataupun pernyataan terkait.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehinggakan memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dengan analisis preskripsi ini, penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA. Tjg dan 11/Pdt.g/2018/PTA. Bjm.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan memuat landasan teori yang terdiri dari Nikah siri, sahnya perkawinan, isbat nikah, perceraian, kumulasi gugatan, hukum acara di Pengadilan Agama, alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, putusan hakim dan upaya hukum, serta teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam hukum.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, deskripsi masalah dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Tjg dan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.